

Kepemimpinan Imam Khomaeni pada Revolusi Iran Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia

Erman Adia Kusumah

Program Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

r.adiakusumah@gmail.com

ABSTRAK:

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Imam Khomaeni, pola kepemimpinan Imam Khomaeni, dan dinamika Politik kontemporer di Indonesia. Dalam penyusunan jurnal ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang meliputi metode pengumpulan data secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Etika politik Imam Khomaeni mengedepankan human relation (hubungan antara manusia) dia berdiri diatas semua golongan, yang artinya etika politik Imam Khomaeni ini tidak hanya tertuju pada suatu kaum saja baik karena persamaan kulit, agama dan bahasa melainkan dia menjalankannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, peneliti juga menemukan ada kesamaan pola kepemimpinan Imam Khomaeni dan Nabi Muhammad,.

Namun hal ini belum digunakan sebagai acuan sepenuhnya dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Untuk itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan, baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia dimana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Kata kunci: Ummah, Imamah, Etika Politik

PENDAHULUAN

Ummah dan Imamah adalah dua hal yang saling berkaitan ummah secara istilah bias diartikan umat dan Imamah sendiri seorang imam atau pemimpin, ke Imamahan dalam Islam sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah mekah ke Madinah, pada saat Rasul berhasil membentuk Negara Madinah dan menjadi Imam bagi seluruh masyarakat Madinah yang heterogen, perbedaan keyakinan dan kabilah mapu diredam dan dipersatukan dalam piagam Madinah yang berisi 47 pasal kehidupan masyarakat¹, Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai sosok imam yang mapu menyelesaikan permasalahan umat serta pemimpin yang demokrasi pada masa yang kebanyakan pada saat itu berbentuk kerajaan yang absolut.

Kepemimpinan Nabi Muhammad saat itu sangat disegani setiap lawan politiknya, kepemimpinan dalam Islam sendiri mengalami beberapa pergantian setelah wafatnya Rasul, diantara Abu Bakar r.a, Umar Bin Khathab r.a, Usman Bin Affan dan Imam Ali bin Abu Thalib, namun seiringnya waktu kepemimpinan Islam mengalami kemuduran yang signifikan dimana dalam prakteknya, beberapa umat Islam terpecah menjadi bebarapa golongan politik yang paling menonjol adalah perselisihan antara Imam Husein dan Muawiyah yang dimana perselisihan ini membuat cucu Nabi Muhammad harus gugur di padang karbala pada 10 Muharram.

membahas mengenai Ummah dan Imamah juga tidak akan terlepas dari sebuah proses politik pada masa Nabi Muhammad tidak terlepas dari sebuah proses politik perjuangan Nabi dalam berdakwah untuk menyadarkan masyarakat Arab kuno dari belenggu Jahiliyah, Nabi Muhammad merupakan tokoh politik terkemuka pada zamanya.

Dewasa ini berbagai pengertian politik banyak diungkap oleh beberapa ahli seperti Aritoteles, Jurgen Habermas, Immanuel Levinas, Albert Camus, pada awalnya politik dimaknai sebagai pengelolaan polis di masa Yunani Kuno, atau mengenai hal-hal polis (makna harfiahnya: kota sering dipadankan dengan istilah “Negara kota”, Aritoteles menyatakan bahwa polis adalah tempat terbaik bagi manusia, meleluasakan orang untuk mencapai tujuannya, mencapai yang terbaik² dalam hal ini politik lebih ditekankan kepada bagaimana social manusia dalam suatu ruang public untuk mencapai suatu tujuan yang sifatnya untuk kemaslahatan rakyat bukan megenai keuntungan pribadi ataupun golongannya, dalam hal ini

¹ Dr. Muhammad Iqbal. M.Ag, *Fiqh Siyasaah, Kontekstualisas Doktrin Politik Islam*, Yofa Mulia Ofset, Jakarta 2007

² Aristoteles. *Politics*, terjmh. H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 1959) hal. 8-9

politik mengikuti harus menggunakan etika dalam prosesnya. Begitu juga dalam kepemimpinan Islam dimana para Khalifah sangat menjunjung tinggi etika dalam setiap prosesnya

Setelah masa keemasan Islam, Jazirah Arab banyak yang kembali menganut system monarki absolut sebut saja kerajaan Saudi, atau Iran pada era Mohammad Shah Reza Pahlevi yang dulu menganut system monarki, namun akhirnya runtuh setelah terjadi revolusi Iran yang dipimpin Imam Ayatullah Khomeini pada tanggal 16 Januari 1979 yang dimana memaksa Shah Reza harus keluar dari Iran hal ini tidak terlepas dari kebijakan westernisasi dan pengakuannya terhadap Negara Israel, mulai saat itulah Iran merubah wajahnya menjadi Negara Republik Islam Iran, sosok Imam Khomeini yang bersahaja.

Dalam prakteknya setiap kepemimpinan dalam Islam mempunyai kelebihan masing-masing, seperti kepemimpinan Abu Bakar r.a yang dimana kebijakannya banyak yang meneruskan dari kebijakan masa Nabi Muhammad, pada masa itu memang belum ada pemisahan structural pemerintahan seperti yudikatif, legislative dan eksekutif, semua kebijakan bertumpu kepada khilafah Abu Bakar, begitu juga dengan keimamahan pada era Imam Khomeini adalah salah satu wujud kepemimpinan Islam yang masih bertahan sampai saat ini. Keimamahan sendiri lebih dikenal di Islam Syiah, sebagai salah satu aliran terbesar dalam Islam, syiah selalu menempatkan Imam sebagai pemimpin tertinggi, bahkan di era modern ini Negara yang menganut Republik Islam hanya Iran saja. Oleh karena itu, kajian ilmiah ini akan melakukan pendekatan pemikiran mengenai konsepsi Imamah, dalam hal ini, Nabi Muhammad serta Imam Khomeini untuk mendapat model kepemimpinan ideal dewasa ini, Di antara keberagaman pemikiran keduanya terdapat gagasan sosialisme dan demokrasi.

LANDASAN TEORI

Etika Politik

Dewasa ini politik selalu dikonotasikan negatif, hal ini tidak terlepas dari perilaku politisi yang dianggap melakukan berbagai cara dalam mencapai segala tujuannya tanpa memperhitungkan moralitas, pada hakekatnya setiap manusia yang berpolitik tidak boleh lepas dari etika politik itu sendiri, memang gerakan politik tidak semua menghilangkan nilai-nilai moralitas, secara Epistemologi politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politique* atau *Police* yang berarti kota, dalam bahasa Arab politik identik dengan kata *Siyasah* menurut pengertian bahasa berarti “mengajar kuda liar” kata ini mengandung pengertian, pendidikan, pembaharuan dan penyempurnaan, dilihat dari sudut pandang istilah politik berfungsi mengubah masyarakat dari kondisi spiritual dan moral.

Etika politik merupakan salah satu cabang dalam ilmu etika yang membahas tentang hakikat manusia sebagai makhluk social yang berpolitik, dan sebagai pengontrol manusia yang melakukan proses politik, etika politik banyak membahas mengenai perilaku pelaku politik namun bukan berarti etika politik menjadi pendoman siap pakai dalam menentukan kebijakan politik itu sendiri melainkan hanya sebagai rambu-rambu dalam menentukan kebijakan politik Suatu Negara yang maju merupakan Negara yang para pelaku politiknya selalu menggunkan etika dalam setiap tindakannya ini merupakan indikator terpenting dalam melihat perkembangan suatu Negara dalam proses politiknya, karena etika politik juga berfungsi sebagai penata masyarakat yang normative, bagaimana unsur-unsur norma sendiri menjadi yang penting dalam objectivitas politik.

Seperti halnya Negara-negara yang menganut sebuah system keagamaan, maka harus adanya etika politik yang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam agamanya, sebagai manusia yang memiliki spiritual keagamaan yang sejati maka setiap langkah yang akan diambil tidak akan lepas dari koridor spiritual, hal ini membuat banyak harapan untuk menekan angka korupsi dan criminal disetiap Negara.

Pengertian Ummah dan Imamah

Imamah secara makna, kesamaan tersebut mencakup makna yang bentuknya yang terbatas³ dalam kajian sosiologisnya Ali Syariati mengatakan bahwa pemilihan kata Ummah menunjukkan adanya cita rasa sang pemilih, sedangkan menurut Montgemery Matt mengatakan bahwa Ummah merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidup bersama dalam kehidupan social dan konsep-konsep terapan yang mereka setuju bersama.⁴ Istilah Ummah sendiri mempunyai banyak arti, namun disini membuat banyaknya khazanah keilmuan yang semakin menarik, Istilah Ummah sendiri berasal kata *Amma* yang artinya bermaksud (Qashada) dan berniat keras (azima) pengertian seperti ini bisa memberika tiga pengertian yang berbeda yakni “gerakan”, “tujuan” dan “ketetapan hati yang sadar” yang secara prinsipil Ummah bisa di artikan sebagai sekelompok masyarakat manusia yang menuju jalan tertentu.⁵ Imamah bisa di istilahkan sebagai pemimpin, konsep Ummah ini tidak akan lepas peran penting dari imamah sendiri, dalam Fiqh Siyash kata imamah biasa di identikan dengan khilafah, pemahaman Imamah sendiri lebih populer di kalangan syiah sedangkan khilafah lebih populer dikalangan sunni, namun ada perbedaan pendapat yang mendasar terkait dua hal tersebut, kalangan Syiah memahami Imamah merupakan prinsip dari ajaran agama, namun Sunni

³ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, Rausyan Fikr Institute, Yogyakarta, Hal. 38

⁴ Op Cit hal.38

memandangnya tidak seperti itu⁶, namun beberapa kalangan di sunni banyak pula yang menggunakan terminology yang sama.

Konsep Imamah sendiri mempunyai dua Fungsi yang pertama adalah menegakan agama Islam yang kedua menjalankan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas ajaran Islam, dalam hal ini peran Imamah sangat penting dalam keberlangsungan Ummah, karena Imamah juga bisa dikatakan sebagai pemimpin yang menjaga agama Islam dalam mengatur kehidupan dunia, konsep Imamah sendiri sampai sekarang ini masih dipakai Negara Republik Islam Iran dimana ada dua kepemimpinan, yaitu seorang Imam atau pemimpin agung mempunyai kekuasaan telak dalam memutuskan perkara hukum agama, bahkan untuk menyatakan perang, presiden sendiri merupakan orang terpenting kedua yaitu berfungsi memastikan konstitusi Negara berjalan dengan baik, presiden sendiri dipilih melalui pemilihan umum melalui para Majelis Wali Iran, baru bisa mengikuti pemilu, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon presiden harus serasi dengan gagasan Negara Islam,

Iran menjadi satu-satunya Negara di dunia yang masih menggunakan konsep kepemimpinan Islam yang seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana bahwa Negara Islam dalam menjalankan kenegaraannya harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, bahkan Negara yang dimana Nabi Muhammad membentuk Negara Madinah pun tidak memiliki konsep Negara Islam, namun malah bersifat monarki Absolut, hal ini juga membantah asumsi bahwa di dunia ini sudah tidak ada Negara yang berlandaskan Islam.

Seperti diketahui bahwa di Iran pun masih banyak yang menganut agama Yahudi terbesar kedua setelah Israel, namun minoritas Yahudi setelah terjadinya revolusi Iran mereka tetap di Negara tersebut dengan mematuhi pemimpin agung pada saat itu yaitu Ayatullah Khomaeni, hal ini memperlihatkan persamaan antara Iran pasca revolusi dengan Negara madinah yang dipimpin Nabi Muhammad mempunyai kesamaan yaitu kaum-kaum minoritas agama mampu bersinergi dibawah kepemimpinan Islam sendiri.

Ke Imamahan Masa Nabi Muhammad

Pada dasarnya agama dan politik tidak dapat dipisahkan, hal ini terlihat dari perjalanan politik Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwahnya terhadap bangsa Arab yang penuh kemusyrikan dan perilaku Jahiliyah, gerakan dakwah politik Rasulullah SAW

⁶ Dr. Muhammad Iqbal. M.Ag, Fiqh Siyasah, Kontekstualisas Doktrin Politik Islam, Yofa Mulia Ofset, Jakarta 2007. Hal. 129

merupakan gerakan yang yang mengedepankan spritual dan moralitas, dakwah Nabi Muhammad SAW selalu mengajak umatnya dengan cara lembut, bijaksana dan penuh keteladanan, dalam setiap dakwahnya dalam merespon isu-isu yang berkembang dengan konsep Tabayyun, melakukan kroscek terlebih dahulu dari infomasi dari bertta-berita yang belum ada kejelasan sumber faktanya.

Karena sejatinya konsep dakwah rasulullah adalah untuk mengajak umat manusia menjadi lebih baik, dan bukan menakut-nakuti mereka dengan ancaman, itimidasi, menyebar fitnah untuk menjatuhkan lawan politiknya demi tercapainya tujuan dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri, dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan tuntunan dalam berkampanye dengan program kebaikan dengan tiga cara yaitu dengan Hikmah, pelajaran yang baik serta beragumentasilah dengan baik, ketiga hal tersebut diterangkan dalam QS An-Nahl:125.

Ali Syariati mengatakan bahwa sosok Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin militer yang mampu memimpin perang sebanyak 64 kali pertempuran dan inilah yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain di dunia selain itu dalam kepemimpinannya selama 10 tahun, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar seorang pemimpin militer semata melainkan ia juga memperlihatkan nilai kemanusiaan yang sangat terpuji. Muhammad merupakan sosok pemimpin yang begitu dekat dengan masyarakat.⁷

Gerakan politik Nabi Muhammad dewasa ini lebih dikenal sebagai bentuk kontrak social abad pencerahan seperti Thomas Hobbes, J. Locke dan J. Rousseou, kontrak social yang dilakukan Rasul membuat semua elemen kemasyarakatan yang heterogen dapat berdampingan serta saling bahu-membahu, hal itu tercantum dalam piagam Madinah, dalam system kenegaraannya Nabi Muhammad tidak memisahkan antara Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, dalam naungan wahyu Allah Nabi Muhammad menjalankan peran Legislatif dimana ia menjelaskan kepada masyarakat Madinah mengenai permasalahan yang yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad menentukan sendiri hokum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an.

System politik yang dibangun Rasulullah dan kaum Mukmin di Madinah dilihat dari variable-variabel yang ada dalam teori politik modern system yang digunakan adalah system *par excellence* , dalam waktu yang sama juga bias dikatakan system Religius, dalam hal ini

⁷ Dr. Muhammad Iqbal. M.Ag, Fiqh Siyasah, Kontekstualisas Doktrin Politik Islam, Yofa Mulia Ofset, Jakarta 2007

gerakan politik yang dilakukan mempunyai dua karakter.⁸ Gaya kepemimpinan Nabi Muhammad selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiannya, hal ini dilihat bagaimana beliau menyelesaikan persoalan yang menimpa Negara Madinah pada saat itu, Hubungan kemanusiaan menjadi ciri khas dalam kepemimpinan Nabi Muhammad, belisus selalu mengacu kepada Al-Quran yaitu *kafatan linnas* dan *rahmatan lil 'alamin*. Dan hal ini justru tidak menjadi acuan politik di Indonesia, bahkan banyak para pelaku politik yang diluar etika dan prinsip yang merupakan sebuah pondasi.

Dalam hal ini politik harus didasari dengan moralitas sebagai pondasi bangunan untuk mencapai suatu tujuan dengan kemaslahatan bersama, hal itu yang diajarkan Nabi Muhammad melalui gerakan politik, dalam gerakan politik Rasulullah jelas merangkum dua karakter yang berbeda antara materi dan rohani karena keduanya saling berkesinambungan, namun beberapa kalangan umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama Islam itu hanya sekedar dakwah menyangkut rohani bukan terkait materi dunia, namun jika kita memandang lebih jauh beberapa pemikir barat seperti Dr. V. Fitzgerald mengatakan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama melainkan juga suatu system politik dan pendapat lain yang diungkapkan Prof. R. Strothmann menyatakan bahwa Islam adalah sebuah fenomena agama dan politik karena pembangunnya seorang Nabi yang juga seorang politikus bijaksana dan seorang negarawan⁹

Sistem politik Muhammad ini banyak mengubah sistem social yang ada pada masyarakat Madinah, sehingga menciptakan masyarakat yang berbudaya, diawal pembentukan negara Madinah, Muhammad membuat Piagam Madinah yang berisi 47 pasal, pasal ini mengatur tentang peraturan –peraturan dan hubungan anatara komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk, negara madinah sendiri bisa dikatakan negara dalam pengertian yang sebenarnya, karena Madinah memenuhi semua unsure syarat dalam pembentukan negara seperti, Wilayah, Rakyat, pemerintah serta Undang-undang.

Menurut Nurcholish Madjid Piagam Madinah merupakan sesuatu yang mengagumkan, karena dalam pokok-pokok ide piagam Madinah menjadi pandangan hidup dewasa ini, karena dalam piagam tersebut memuat tentang kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi, serta bela negara seperti yang kita ketahui di Madinah sendiri terdapat 3 kelompok, yaitu kaum Muhajirin, Anshar serta Yahudi.

⁸ Dr. M. Dhiadudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani Hal. 4

⁹ Op cit. Hal 6

Dengan adanya piagam Madinah ini merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad yang tidak hanya mementingkan umat Islam saja melainkan juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi, sikap kepemimpinan Rasulullah yang mengambil beberapa hukum yang digunakan pada masa kepemimpinannya, mungkin selama ini umat Islam mengira bahwa hukum rajam merupakan hukuman yang diajarkan dalam Al-Qur'an, namun ternyata hukum rajam merupakan ajaran Yahudi, hukum rajam sendiri digunakan ketika pada saat masyarakat dari golongan Yahudi melakukan perzinahan, ada selisih pendapat diantara tokoh Yahudi terkait hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku, setelah yang cukup lama akhirnya mereka bersepakat mengajukan perkara ini kepada Nabi Muhammad untuk diputuskan, pada saat itu Rasulullah tidak begitu saja memutuskan perkara tersebut sesuai dengan hukum yang dianut umat Islam. Melainkan justru Nabi Muhammad bertanya kepada pemuka Yahudi tentang sanksi hukuman yang ada dalam Taurat, lalu mereka menjawab, bahwa yang sanksi bagi pezina yang telah berkeluarga adalah rajam, akhirnya Nabi pun menjatuhkan sanksi hukum sesuai dengan yang terkandung dalam kitab suci mereka¹⁰

Pada saat itu Nabi begitu menyadari bahwa dirinya memimpin masyarakat yang majemuk, bahkan kehebatan Nabi adalah ketika dirinya mampu menyatukan perbedaan keyaakinan sehingga hidup berdampingan hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang masih menyembah berhala, namun mereka tidak di musuhi maupun diusir dari Madinah, bahkan sekretaris negara berasal dari golongan Yahudi, kehidupan masyarakat yang majemuk dan hidup berdampingan ini tidak terlepas dari perjanjian piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad. Namun setiap kepemimpinan pasti mengalami guncangan begitu juga dengan kepemimpinan Nabi yang semakin besar pengaruhnya dan kedudukan Umat Islam yang semakin kuat, muncul sebuah masalah ketika satu demi satu orang Yahudi yang keras kepala mulai melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian piagam Madinah, mereka melakukan berbagai teror kepada Umat Islam, bahkan mencoba membunuh Nabi Muhammad namun usaha tersebut gagal.

Mereka melakukan berbagai provokasi untuk memecah umat Islam, suku Aws dan Khazraj yang sudah dipersatukan Nabi pun mulai diungkit luka-luka lama mereka yang sempat bermusuhan oleh kaum Yahudi dengan mengungkit perang Bu'ats, dengan kecerdasan orang Yahudi perang pun terjadi antara dua kelompok, pada saat itu Nabi Muhammad yang mendengar adanya perang antara Aws dan Khazraj pun langsung datang ke lokasi perang,

¹⁰ Dr. Muhammad Iqbal. M.Ag, Fiqh Siyasah, Kontekstualisas Doktrin Politik Islam, hal 34.

beliau segera mendamaikan kedua kelompok yang bertikai, peristiwa ini yang melatar belakangi surat Ali 'Imran, 4:108 diturunkan oleh Allah SWT.

Dalam setiap keputusan yang diambil Rasul selalu melalui beberapa tahap seperti melakukan jajak pendapat dengan para sahabat ataupun melakukan putusan sendiri sebagai pemimpin Negara, Nabi Muhammad sendiri selalu mendahulukan musyawarah mengenai hal kenegaraan seperti perang, perjanjian dan urusan politik luar negeri, dalam hal kemasyarakatan Rasul berhasil menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi selain itu Beliau membentuk system Muakhah diantara kaum Muhajirin dan Anshar walaupun pada akhirnya system ini dibatalkan.

Nabi Muhammad pun bertindak sebagai hakim dalam perkara-perkara dalam anggota masyarakat, beliau membentuk suatu lembaga Hisbah yang diperuntukan untuk menertibkan perdagangan curang dalam masyarakat. Tidak jarang beliau melakukan sidak langsung terdapat para pedagang di pasar, Negara Madinah sendiri terdiri dari beberapa Provinsi yang dipimpin para Sahabat sebagai Gubenurnya seperti Provinsi Tayima, Al Jamad, Banu Kindah, Mekah, Yaman, Oman, Bahrain dan Hadra Maut¹¹ Nabi Muhammad memberikan wewenang yang penuh terhadap para sahabat dalam menjalankan pemerintahan di setiap daerah, namun tetap dipertanggungjawabkan kepada Nabi Muhammad sebagai kepala Negara.

Dalam urusan kebijakan politik Internasional Nabi Muhammad mengirimkan surat dakwah kepada Negara sahabat yang isinya ajakan untuk memeluk agama Islam, ada sekitar 30 pucuk surat yang dikirim Nabi, ada sebagian menolak dakwah Muhammad sebagian lagi menerima aja untuk masuk Islam, penolakan yang dialami Rasul salah satunya yaitu dari kerajaan Kirsa Persia, bahkan surat yang dikirimkan dikoyak-koyak mendapat kabar adanya penolak dari kisra Nabi Muhammad ,menyatakan bahwa suatu saat nanti kerajaannya juga akan terkoyak-koyak layaknya surat yang diterima sang Raja.

Kepemimpinan Nabi Muhammad memang selalu menemui tantangan, namun hal ini mampu diselesaikannya melalui beberapa tahap seperti melalui jalan diplomatis maupun melalui jalan perang, penyebaran kekuasaan Islam pada saat itu memang tidak mengalami perkembang yang pesat, namun para secara system pemerintahan kepemimpinan merupakan kepemimpinan yang sangat modern pada zamannya, dan banyak para ahli mengatakan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad ini paling ideal sebagai pemimpin Negara.

¹¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juzu , Mesir Dar al Fikr, 1977. Hal 202

PEMBAHASAN

Imam Khomaeni dalam revolusi Iran

Ruhullah al- Musawi al Khomeini dalah nama lengkap dari Imam Khomaeni tokoh revolusi Iran 1979 yang berhasil menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi, Imam Khomaeni lahir bertepatan dengan hari dimana putri Nabi Muhammad Fatimah Azzahra dilahirkan pada 24 september 1902, dilahirkan di Khomein 300 km dari kota Teheran,¹² asal keluarganya merupakan berasal dari India di kota kecil kintur, Imam Khomaeni merupaka keturunan langsung dari Nabi Muhammad baik dari garis ayah dan ibunya, ayahnya merupakan seorang ulama besar di Khomein yang bernama Ayatullah Sayyid Mustafa al-Musawi.

Sejak kecil Imam Khomaeni sudah banyak berguru kepada para ulama di timur-tengah, pada usia yang ke 17 tepatnya pada 1917, Imam Khomaeni kehilangan ibunya di tahun yang sama pula bibi yang sela ini ikut merawatnya meninggal, pada tahun 1925 dimana dinasti Qajar engalami kehancuran lalu digantikan oleh dinasti Pahlevi dengan bantuan Inggris, pada saat itu Reza Khan menjadi Syah Iran diman kebijakan politik dari Dinasti Pahlevi ini banyak mendeskreditkan Islam, ketika itu masih banyak ulama Iran yang berdiam saja, bahkan sebagian ulama banyak yang mendukung kebijakan rezim Pahlevi ini.

Imam Khomaeni pasda saat itu menjadi ulama yang satu-satunya berani mengkritik kebijakan Reza Pahlevi, sampai dia membuat buku yang berjudul *Kasyf al-Asrar*, buku inii sebagai bentuk penolakannya terhadap selebaran kebijakan yang dikeluarkan rezim Pahlevi, kekecewaan Imam Khomaeni terhadap para kaum agamawan yang tunduk terhadap rezimnya digambarkan dalam sebuah puisi “Lihatlah, disiksa aku pendeta kota, dengan khotbah busuk dan sia-sia”¹³

Pada tahun 1953, Imam Khomaeni sangat dekat dengan seorang pemimpin para ulama tersohor di Qu. Yang bernama Burujerdi yang dimana pada saat itu ia memiliki banyak murid yang tersebar diberbagai daerah yang memegang jabatan penting, dari sinilih kekuatan gerakan Imam Khomaeni ini mendapat dukungan dari masyarakat,¹⁴ Khomaeni sendiri mulai secara aktif terjun ke dalam dunia politik pada tahun 1960, dalam gerakan politiknya Imam Khomaeni banyak diasingkan oleh rezim Pahlevi karena dianggap membahayakan.

¹² Hujjatul Islam Muahammad Ali Anshari, Imam Khomeini, Hidup dan Karyanya dalam Sekilas Tentang Khomeini. Ed. Musa Kashim, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2001, hlm. 43

¹³ Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam. Cet. I. Mizan, Bandung, 2002. hlm. 152

¹⁴ Baqer Moin, Ayatullah Khomeini mencari Kesempurnaan: Teori dan Praktek, dalam Para Perintis Zaman Baru Islam, Mizan, Bandung, 1998, Cet III. Hlm. 87

Isu yang di lontarkan oleh Imam Khomaeni adalah mengenai *Land Reform* dan pengakuan Negara Israel yang merupakan perjanjian politik antara rezim Pahlevi dengan Amerika Serikat, pada saat itu Amerika Serikat terus menekan Syah Reza untuk melakukan *Land Reform*, kebijakan-kebijakan Syah Reza mulai mengalami banyak penolakan di berbagai pelosok Iran, pada tahun 1979 merupakan memontum penting dalam gerakan Revolusi Iran menuju Negara Islam, saat itu Imam Khomaeni pulang dari pengasingan dan langsung memimpin demonstrasi besar-besar dalam upayanya menggulingkan rezim Pahlevi ini.

Secara garis besar ada empat persoalan yang melatar belakangi revolusi Iran yang di pimpinnya antara lain:

1) Intervensi Negara-Negara Barat

Dimana pada saat itu Amerika ingin menguasai Iran sebagai bonekanya di timur-tengah, pada masa Syah Reza Iran menjadi satu-satunya negara yang bisa di intervensi oleh Amerika Serikat, selain itu USA juga menguasai 40% minyak di Iran, dan ini jelas banyak merugikan rakyat Iran Pada saat itu¹⁵

2) Modernisasi di Bidang Ekonomi

Pada saat itu Syah Reza mengeluarkan program modernisasi dibidang ekonomi, namun program ini mengalami kegagalan, bahkan perindustrian lumpuh sehingga terjadinya eksodus besar-besar ke kota¹⁶ selain itu program Land Reform yang dilakukan Syah Reza dibidang pertanian terjadi sebuah kegagalan.

3) Westernisasi

Modernisasi yang masuk ke Iran yaitu berbentuk westernisasi, yang dimana dampak westernisasi ini tercabutnya Iran dari lembaga-lembaga sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan hukum-hukum pribumi demi “Country Part“ dari dunia barat. Yang kedua , proses politik westrenisasi memanjakan para elit politik di Iran. Mereka menunjukkan sangat menggebu-nggebu untuk meruntuhkan secara total masyarakat Iran dalam usaha mewujudkan cita-cita masyarakat barat. Ketiga , proses modernisasi yang berbagai macam secara inheren menunjukkan kecenderungan di Iran khususnya ke arah atomisasi masyarakat birokratis dan sentralisasi serta hegemoni kebudayaan.¹⁷

¹⁵ Iqbal Asawa, Iran: Suatu Studi Kasus Kebangkitan Politik Muslim, dalam Gerbang Revolusi Iran dan Khomeini dalam Perbincangan, ed. Halim Siddiqie dan Hamid Algar, Terj. Tim Naskah Shalahuddin, Shalhuddin Press, Yogyakarta, 1984. hlm. 41

¹⁶ Nasir Tamara, Revolusi Iran, Sinar harapan, Jakarta, 1984, hlm. 104-107

¹⁷John L, Esposito, Ancaman Islam Mitos atau realitas?, Terj. Awaliyah Abdurrahman, Mizan, Bandung, 1996, hlm.117-118

Westernisasi ini jelas menggelisahkan para kaum agamawan dan adanya ketakutan nilai-nilai ke-Islaman hilang.

4) Tindakan Otokratik Refresif Rezim Pahlevi

Dalam melanggengkan kekuasaannya Syah Reza menggantungkan kekayaan dari hasil penjualan minyak bumi, memanipulasi pembangunan serta membetuk agen rahasia SAVAK, untuk melancarkan aksi-aksi pembangkangan terhadap kekuasaannya.¹⁸

Imam Khomaeni merupakan sosok yang sangat dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya sama seperti kepemimpinannya Nabi Muhammad saat Negara Madinah, kedekatannya dengan rakyat menjadi modal utama dalam melakukan revolusi Iran pada tahun 1979, dimana pada saat itu Syah Reza sangat dekat dengan Amerika, hal ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Imam Khomaeni, keruntuhan rezim Syah Reza membuka lembaran baru bagi negara Iran dalam membangun Negara Islam modern yang demokrasi, system pemerintahan banyak yang rubah pasca kejatuhan rezim ini.

Demokrasi dalam pandangan Imam Khomaeni

Menurut kaidah epistemologi demokrasi berasal dari Yunani yaitu demos yang berarti masyarakat serta kratio yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Secara terminologi Demokrasi Modern dapat dipahami melalui pendapat para pakar. Jhon Locke sebagai bapak demokrasi modern memaparkan demokrasi sebagai perwakilan tidak langsung rakyat pada kekuasaan pemerintah sehingga kekuasaan absolut dapat dibatasi oleh konstitusi dan hak rakyat¹⁹.

Istilah demokrasi pertama kali muncul sebagai wacana dialektika di Athena dengan Cleisthenes sebagai Bapak Demokrasi klasik pada 508 SM²⁰ Sedangkan Franz Magnis Suseno menafsirkan bahwa konsep demokrasi telah muncul terlebih dahulu di bawa oleh sosok Abraham di masyarakat israel empat ribu tahun sebelumnya. Dari sini lah konsep demokrasi mulai diadaptasi oleh negara lain²¹

Dalam waiatnya terakhir pada rakyat Iran, Imam Khomaeni berpepesan bahwa pentingnya rakyat dalam berpartisipasi dalam politik untuk menentukan pemimpin dan

¹⁸John Obert Voll, Politik Islam Kelangsungan dan Perkembangan di Dunia Modern, terj. Ajat Sudrajat, Titihan Ilahi. Yogyakarta, 2002, hlm. 369

¹⁹ Zulfikri, S. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas

²⁰ Bawazir, T. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi: antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

²¹ Franz Magnis, S. (1993). *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

wakilnya di pemerintahan, namun menurut Imam Khomaeni kekuasaan rakyat bukanlah kekuasaan yang mutlak, melainkan kekuasaan rakyat dibatasi oleh hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam, tidak seperti dinegara lain, demokrasi di Iran merupakan demokrasi yang sesuai dengan tuntunan al-qur'an sebagai pendoman utamanya.

Dari beberapa tulisannya nampak Imam Khomaeni banyak mengkritik mengenai demokrasi barat yang banyak merusak dunia timur, khususnya dunia Islam, umat Islam harusnya mengajarkan kepada dunia barat mengenai demokrasi yang sesungguhnya, Imam Khomaeni menawarkan sebuah system demokrasi yang baru yang berlandaskan Islam, ia menyebutnya demokrasi sejati, menurut Khomaeni demokrasi barat lebih menekankan kepada kapitalis dan penindasan kepada rakyat jelata. Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang berlandaskan kepada hukum-hukum tuhan.

Demokrasi di Indonesia

Kendatipun secara de facto, demokrasi di Indonesia dijalankan dalam sistem formal aturan pasca reformasi, gagasannya hadir beriringan dengan kemerdekaan Indonesia. Kata demokrasi terwakil pada sila keempat Pancasila, "Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 tertulis secara legitimasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga secara esensial dua paradigma hukum Indonesia menyiratkan amanah implementasi demokrasi.

Dalam perjalanannya penerapan demokrasi harus secara sistem tata negara harus terinterupsi oleh masa orde lama dan baru. Pada masa orde lama penerapan demokrasi dipimpin dijalankan tidak sesuai dengan harapan, pelaksanaan demokrasi cenderung model otoriter yang dipimpin Soekarno. Pembubaran Masyumi dan PSI menjadi indikator penerapan otoriter pada masa itu²²

Padahal jauh sebelum praktek tersebut terjadi Soekarno telah mewarisi gagasan tentang demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa, sosdem yang akan menjadi, bahasan utama dalam jurnal ini. Perkemabangan demokrasi, pasca berakhir era Soekarno tidak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di era Soeharto sistem feodalistik mulai diterapkan melalui penyatuan birokrasi dan militer dibawah komandannya serta upaya pemberangusan terhadap politik masyarakat luas. Purnaweni menjelaskan bahwa keberadaan gerakan politik masyarakat pada masa tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas politik.

²² Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi Indonesia, Dari Masa Kemasa. Jurnal Administrasi Publik*

Era Reformasi membawa harapan baru dalam perjalanan demokratisasi di Indonesia. Kemunculan beragam partai politik, kebebasan berserikat, kebebasan pers menjadi indikator demokratisasi bergulir dengan akselerasi tinggi.²³

Pada era inilah tatanan demokrasi Indonesia terbangun baik pada sisi masyarakat maupun lembaga-lembaga tinggi yang bemewadahi aspirasi masyarakat dalam berdemosi. Namun demokratisasi pasca reformasi tidak dapat dikatakan sempurna. Dalam perjalanannya, kekerasan politik maupun politik SARA kerap terjadi. Pemaksaan aspirasi mulai dari pemaksaan verbal hingga pemaksaan fisik oleh sekelompok orang mewarnai demokratisasi Indonesia.²⁴ Tindakan-tindakan tersebut sebenarnya merupakan hal-hal yang kontra terhadap tujuan utama dari demokrasi. Kemunculan Konflik pada proses demokratisasi sebenarnya telah di wacanakan oleh Jack Synder dalam bukunya *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan darah*. Sosok pemikir liberal ini memiliki hipotesa bahwa proses demokratisasi berpotensi menimbulkan konflik apabila persyaratan-persyaratan demokrasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Synder mencatat demokratisasi di Jerman menyurlut sebuha terjadinya nasionalisme yang tidak sejalan dengan konsep revolusioner negara tersebut. Bahkan di negara berkembang proses demokratisasi²⁵ berpotensi menghasilkan sebuah konsep Nasionalisme SARA, sebuah kebersamaan yang dibangun dari pondasi sikap menjunjung sebuah kelompok. Konflik-konflik yang terjadi di dunia, seperti dicatat Synder, berpotensi untuk memicu pertumpahan darah

Aktualisasi politik dan kepemimpinan di Indonesia

Politik masyarakat di Indonesia dewasa ini harus bersifat rasional dalam arti pertimbangan ekonomi akan lebih menojol dari yang lain, akan ada kepentingan =-kepentingan politik yang saling berbeda dan saling berhadapan, pemimpin pemerintahan masih akan mempunyai peranan penting, jadi akan ada tiga kekuatan besar, yaitu big government, big bussines dan big labour, masih lagi harus diperhitungkan kekuatan politik dari petani, pengusaha kecil dan mahasiswa.

Keadaan politik di Indonesia dewasa ini sangat carut marut, bagaimana masyarakat setiap hari dipertontonkan oleh tingkah laku para pejabat Negara yang jauh dari etika politik dalam bernegara, bagaimana seorang pejabat dalam prose politik di Indonesia selalu saling

²³ Aspinall, E. (2000). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKIS

²⁴ Suharso. (2000). "*Quo Vadis Demokrasi Indonesia*" dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*. . Yogyakarta: LKIS

²⁵ Suharso. (2000). "*Quo Vadis Demokrasi Indonesia*" dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*. . Yogyakarta: LKIS

menjatuhkan demi mengatasnamakan rakyat, pada dasarnya mereka hanya mewedahi kepentingan golongannya. Indonesia mengandung heterogenitas yang luar biasa, hal ini terlihat dari segi suku, agama dan bahasa

Proses politik yang terjadi dewasa ini lebih kepada kepentingan golongan daripada kepentingan Negara, sehingga banyak sector yang terabaikan oleh pemerintah pusat sendiri dimana ketidakstabilannya mata uang terhadap kurs dollar bahkan masyarakat diperkeruh dengan keadaan politik di Indonesia yang semakin tidak menentu, serta cenderung saling tuding diantar kelompok, hal ini membuktikan adanya sebuah kegagalan kepemimpinan politik untuk menyelesaikan perseolan Negara, rakyat yang dipertontonkan dengan moralitas para pejabat yang akhir-akhir ini banyak menyingkap mengenai persoalan skandal korupsi maupun grativikasi sex, dan hal inilah yang selalu disuguhkan kepada rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bangsanya, politik di Indonesia sendiri seperti tidak mempunyai identitas.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa etika politik Imam Khomaeni mengedepan kan human relation (hubungan antara manusia) dia berdiri diatas semua golongan, yyang artinya etika politik Imam Khomaeni ini tidak hanya tertuju pada suatu kaum saja baik karena persamaan kulit, agama dan bahasa melainkan dia menjalankannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, peneliti juga menemukan ada kesamaan pola kepemimpinan Imam Khomaeni dan Nabi Muhammad,. Namun hal ini belum digunakan sebagai acuan sepenuhnya dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Untuk itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan, baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia dimana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan berupa saran kepada elit politik dalam berpolitik sesuai dengan etika politik dan kepemimpinan Imam Khomaeni.

1. Politik harus didasari moralitas sehingga memberikan suasana baru dalam proses politik.
2. Agama harus menjadi acuan dalam kehidupan politik masa kini.
3. Lalu diadakannya sebuah kunjungan ke Negara Iran sebagai salah satu contoh Negara Islam

Hal inilah yang seharusnya menjadi landasan para pelaku politik dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga masyarakat dapat mempercayai pemimpinnya dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA:

Dr. Muhammad Iqbal. M.Ag, *Fiqh Siyazah, Kontekstualisas Doktrin Politik Islam*, Yofa Mulia Ofset, Jakarta 2007

Aristoteles. *Politics*, terjmh. H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 1959)

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, Rausyan Fikr Institute, Yogyakarta

Dr. M. Dhiadudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani Hal. 4

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juzu , Mesir Dar al Fikr, 1977. Hal 202

Hujjatul Islam Muahammad Ali Anshari, Imam Khomeini, Hidup dan Karyanya dalam Sekilas Tentang Khomeini. Ed. Musa Kashim, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2001

Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam. Cet. I. Mizan, Bandung, 2002.

Baqer Moin, Aytullah Khomeini mencari Kesempurnaan: Teori dan Praktek, dalam Para Perintis Zaman Baru Islam, Mizan, Bandung, 1998

Iqbal Asawa, Iran: Suatu Studi Kasus Kebangkitan Politik Muslim, dalam Gerbang Revolusi Iran dan Khomeini dalam Perbincangan, ed. Halim Siddiqie dan Hamid Algar, Terj. Tim Naskah Shalahuddin, Shalhuddin Press, Yogyakarta, 1984.

Nasir Tamara, Revolusi Iran, Sinar harapan, Jakarta, 1984

John L, Esposito, Ancaman Islam Mitos atau realitas?, Terj. Awaliyah Abdurrahman, Mizan, Bandung, 1996

John Obert Voll, Politik Islam Kelangsungan dan Perkembangan diDunia Modern, terj. Ajat Sudrajat, Titihan Ilahi. Yogyakarta,2002

- Zulfikri, S. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas
- Bawazir, T. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi: antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Franz Magnis, S. (1993). *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi Indonesia, Dari Masa Kemasa*. *Jurnal Administrasi Publik*
- Aspinall, E. (2000). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKIS
- Suharso. (2000). "Quo Vadis Demokrasi Indonesia" dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*. . Yogyakarta: LKIS